

Pelaksanaan Program Swakelola Bantuan Rumah Layak Huni di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Muhammad Rizki¹ Herdi Salioso²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau Jl.Kaharuddin
Nasution No.113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia
muhammadrizki99@student.uir.ac.id herdisalioso@soc.uir.ac.id

Abstract

The implementation of the Decent Housing Program aimed to alleviate poverty by providing safe, healthy, and dignified housing for low-income communities. The purpose of this study was to examine the implementation of the self-managed Decent Housing Assistance Program in Kepenghuluan Sekeladi, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, as well as to identify the inhibiting factors. This research used a qualitative method by conducting interviews with selected informants, and the results were analyzed descriptively. The findings indicated that: (1) The implementation of the Decent Housing Assistance Program had been carried out based on the principle of community empowerment through a self-managed mechanism by community groups (Pokmas). This program reflected the government's strong commitment to improving housing conditions for the poor by involving local residents directly in both planning and execution. The implementation process included village-level meetings to determine recipients, preparation and validation of the budget plan (RAB), opening of Pokmas bank accounts, construction activities, and phased fund disbursement. At the local level, the program also highlighted the active roles of village officials and the community in overseeing the program, both technically and administratively. (2) The inhibiting factors included a lack of transparency and insufficient public outreach regarding the housing assistance program, as well as the limited number of beneficiaries due to quota restrictions.

Key Words : Implementation, Self-Managed, Decent Housing Assistance

Abstrak

Pelaksanaan rumah layak huni bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan hunian yang aman, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program swakelola bantuan rumah layak huni di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni telah dilakukan berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas). Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat miskin dengan melibatkan warga secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proses pelaksanaan dimulai dari musyawarah penetapan penerima, penyusunan RAB, pembukaan rekening Pokmas, hingga pembangunan fisik dan pencairan dana bertahap. Pelaksanaan di tingkat lokal juga menunjukkan peran aktif aparat desa dan masyarakat dalam mengawal jalannya program, baik dari sisi teknis maupun administratif. 2) Faktor penghambat terdiri dari kurangnya transparansi dan sosialisasi program bantuan rumah layak huni ke masyarakat umum dan juga kuota penerima bantuan terbatas.

Key Words : Pelaksanaan, Swakelola, Rumah Layak Huni

Pendahuluan

Kebijakan rumah layak huni yang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PUPR umumnya dilaksanakan dalam bentuk program nasional seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Sejuta Rumah. Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia, termasuk di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Dengan dukungan APBN, skala bantuan yang diberikan lebih besar dan pelaksanaannya melibatkan koordinasi lintas instansi serta menggunakan standar teknis nasional dalam perencanaan dan pengawasan. Pemerintah pusat juga biasanya menetapkan kuota penerima berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan usulan dari daerah.

Sebaliknya, kebijakan rumah layak huni yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Rokan Hilir lebih bersifat komplementer dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan fiskal daerah. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir difokuskan pada rehabilitasi ringan atau sedang rumah warga miskin yang tidak terakomodasi oleh program pusat. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menentukan kriteria penerima, lokasi prioritas, serta pendekatan pelaksanaan sesuai dengan kondisi sosial dan geografis setempat. Meskipun anggarannya terbatas, kebijakan ini memungkinkan pemerintah kabupaten untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh program nasional.

Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Data BPS (2024) menyebutkan di Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk 662.546 jiwa dengan rasio 323.664 penduduk laki-laki dan 338.882 penduduk perempuan. Masalah kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, dengan kondisi ekonomi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Fluktuasi jumlah penduduk miskin dari tahun 2022 yaitu 49.590 (7,53%) ke tahun 2023 menjadi 53.040 jiwa (7,92%).

Program Rumah Layak Huni diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pemukiman dan prasarana desa Dengan pola swakelola atau pemberdayaan masyarakat berupaya mengentaskan kemiskinan melalui program pembangunan rumah sederhana layak huni yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia.

Kriteria penerima program bantuan menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman Dan Prasarana Desa dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada bab III adalah Masyarakat penerima bantuan rumah sederhana layak huni adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni dan masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah serta adanya wilayah kepenghuluan/ kelurahan yang dilakukan relokasi dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pemukiman dengan memperhatikan usulan dan aspirasi dari kepenghuluan/ kelurahan yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini.

Kepenghuluan Sekeladi adalah salah satu desa/ kepenghuluan yang ada di Kecamatan Tanah Putih. Kepenghuluan Sekeladi memiliki luas wilayah 98,79 km² dengan jumlah penduduk 3.092 orang dan KK 751 KK. Di desa ini terdapat 22 RT dan 11 RW dan 1.422 masyarakat miskin. Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani, menurut BPS Kecamatan Tanah Putih dalam angka (2024) di Sekeladi masih terdapat 184 keluarga yang menggunakan listrik non PLN dan 4 KK tanpa listrik. Ini berarti masalah kemiskinan juga menjadi isu yang saat ini terjadi. Kepenghuluan Sekeladi juga termasuk salah satu desa yang menjadi prioritas bantuan rumah layak huni.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Rohil mengadakan kegiatan sosialisasi bersama Kelurahan dan kepenghuluan terkait dana bantuan khusus provinsi Riau untuk rumah layak huni di kabupaten Rokan Hilir selasa 4 Nopember 2023. Bantuan keuangan khusus Provinsi Riau untuk rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir di Tahun Anggaran 2023 sebanyak lima puluh (50) unit rumah. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Riau dengan nilai pagu Rp 4.000.000.000 dengan rincian pagu per unit Rp. 80.000.000 dan dikerjakan dengan Swakelola.

Data kuota jumlah rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Data Kuota Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021-2024

No.	Tahun	Kuota	Sumber Dana
1	2021	117 unit	Bankeu Provinsi + APBD Kabupaten
2	2022	60 unit	Bankeu Provinsi + APBD Kabupaten
3	2023	50 unit	Bankeu Provinsi + APBD Kabupaten
4	2024	20 unit	Bankeu Provinsi + APBD Kabupaten

Sumber: Data Renja Dinas PUPR Rokan Hilir, 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus menganggarkan bantuan rumah layak huni yang sumber dananya berasal dari Bantuan Keuangan provinsi dan juga APBD Kabupaten Rokan Hilir dengan pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dan Dinas PUPR Rokan Hilir sebagai pengawas teknis.

Secara lebih teknis, menurut Penghulu Sekeladi, maka kriterianya penerima Rumah Layak Huni terdiri dari 2 kriteria utama, yaitu Masyarakat penerima bantuan rumah sederhana layak huni adalah masyarakat miskin yang 'memiliki' rumah tidak layak huni ataupun Masyarakat miskin yang 'tidak' memiliki rumah namun memiliki aset lahan yang memiliki hubungan keluarga dalam 1 KK/ luar KK (saudara/orangtua/ dst)

Data penetapan jumlah rumah tidak layak huni Kepenghuluan Sekeladi Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.

Data Penetapan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kepenghuluan Sekeladi Tahun Anggaran 2022

No.	Nama	Keterangan	Pembangunan Tahun Anggaran 2022
1	Sutikno	Tidak layak huni	-
2	Khoiriyah	Tidak layak huni	✓
3	Yopri	Tidak layak huni	-
4	Desmawati	Tidak layak huni	✓
5	Rizal Abdul Rahman	Tidak layak huni	✓

Sumber: Keputusan Penghulu Sekeladi Nomor 17/KPTS/2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Penghulu Sekeladi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni Kepenghuluan Sekeladi di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dari 5 orang yang ditetapkan rumah tidak layak huni, terdapat 3 nama pada tahun 2022 yang direalisasikan. Sementara itu, sisa 2 orang lagi akan diprioritaskan untuk tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis di Kepenghuluan Sekeladi didapatkan fenomena seperti masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum memiliki rumah layak huni. Dari 5 keluarga penerima yang ditetapkan sebagai penerima bantuan program rumah layak huni, hanya 3 yang direalisasikan di tahun 2022 (Keputusan Penghulu Sekeladi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni Kepenghuluan Sekeladi di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022). Seluruh penerima bantuan tahun 2022 dan 2023 tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan perangkat kepenghuluan Sekeladi (wawancara Ketua RT 4 di Kepenghuluan Sekeladi, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi dan pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan program rumah layak huni secara swakelola di tingkat kepenghuluan, khususnya di Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Program ini melibatkan peran aktif masyarakat melalui Pokmas, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi lokal, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan tingginya angka rumah tidak layak huni, penting untuk menilai sejauh mana model swakelola ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, bantuan rumah layak huni berbeda dengan bantuan lain seperti BLT atau PKH yang penerimanya lebih banyak, sementara bantuan rumah layak huni penerimanya sangat terbatas namun nilainya besar sehingga sering menimbulkan konflik/ kecemburuan sosial di tingkat masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program swakelola bantuan Rumah Layak Huni di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor penghambatnya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Soebarsono (2015:2) Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta berbagai lembaga dan organisasi publik yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik.

Menurut Syafiie (2013:42) administrasi publik juga melibatkan berbagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang kompleks, yang melibatkan analisis kebutuhan masyarakat, identifikasi solusi yang tepat, dan implementasi kebijakan yang efektif. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas masalah yang semakin meningkat, administrasi publik juga harus mampu beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Konsep Organisasi

Hasibuan (2011:120) organisasi publik dapat berupa berbagai jenis entitas, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, agensi pemerintah, hingga lembaga pemerintahan yang beroperasi di tingkat lokal. Setiap jenis organisasi publik memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan lingkup dan tujuan mereka.

Selanjutnya Thoha (2013:124) salah satu karakteristik utama dari organisasi publik adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik. Organisasi-organisasi publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan mengelola anggaran publik secara efisien dan efektif. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada kepentingan publik.

Menurut Wursanto (2013:2-5) organisasi publik juga terikat oleh aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan mereka. Hal ini mencakup berbagai peraturan terkait tata kelola organisasi, prosedur pengadaan, etika pelayanan publik, dan kebijakan-kebijakan lain yang harus dipatuhi untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga tersebut.

Konsep Pelaksanaan

Menurut Usman (2012:70) pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan.

Natsir (2019:59) salah satu konsep pelaksanaan atau implementasi kebijakan model Grindle. Menurut Grindle implementasi kebijakan adalah proses di mana kebijakan publik yang diadopsi oleh pemerintah diterjemahkan menjadi tindakan konkret melalui program-program, kegiatan, atau proyek yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga terkait.

Model pelaksanaan kebijakan Grindle dalam (Winarno, 2016:185) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yang meliputi: isi kebijakan dan konteks kebijakan. Grindle juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap kebijakan, ketidaksesuaian sumber daya dan kapasitas, resistensi dari pihak yang terpengaruh, serta perubahan kondisi atau tuntutan di tengah proses implementasi.

Konsep Rumah Layak Huni

Setiap individu berharap memiliki hidup yang berkualitas. Kualitas hidup tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesehatan dan kebahagiaan pribadi, tetapi juga oleh faktor eksternal, termasuk kondisi lingkungan tempat tinggal. Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup adalah mencapai standar rumah layak huni (Widiatmoko, 2022:3).

Menurut Suhaimin (2014:85) Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Sebaliknya rumah tak layak huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, luas minimum bangunan, dan kesehatan penghuni. Memiliki tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan memberikan sejumlah keuntungan, seperti perlindungan, pemeliharaan kesehatan, tingkat kenyamanan yang optimal, dukungan terhadap pembangunan ekonomi, dan perbaikan lingkungan sekitar. Dengan mencapai kriteria untuk tempat tinggal yang sesuai, baik individu maupun keluarga dapat merasakan keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta perlindungan yang memadai. Semua hal ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan secara menyeluruh dalam kualitas hidup.

Metode

Metode yang digunakan adalah kualitatif dipergunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data berbentuk deskriptif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana orang memahami, mengalami, dan memberi makna terhadap fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian di Kepenghuluan Sekeladi yang terletak di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah yang peneliti anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu Ketua Pokmas, Penghulu, Ketua RT 4, Masyarakat tidak mampu, Kepala Dusun Sekeladi Hulu, dan Ketua RW 1. Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini.

Data primer penelitian ini terdiri dari hasil wawancara atas pelaksanaan program rumah layak huni di Kepenghuluan Sekeladi. Data sekunder meliputi Data Jumlah Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2023, Data Luas Wilayah, Penduduk dan KK di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 2024, Data Kuota Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021-2024, dan Data Penetapan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kepenghuluan Sekeladi Tahun Anggaran 2022.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data berdasarkan metode kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Informan pertama dalam penelitian ini adalah Muhammad Rizal selaku Ketua Pokmas program rumah layak huni ini, beliau berusia 35 tahun dengan pendidikan terakhir SMA dan sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta. Informan kedua Muzni selaku Penghulu Sekeladi, beliau berusia 37 tahun dengan pendidikan terakhir S1. Informan ketiga adalah Mazland selaku Ketua RT 4 Kepenghuluan Sekeladi, saat ini beliau berusia 59 tahun dengan pendidikan terakhir SMA dan sehari-harinya bekerja sebagai petani. Informan keempat adalah Asmi salah satu masyarakat tidak mampu di Kepenghuluan Sekeladi, saat ini beliau berusia 42 tahun dengan pendidikan terakhir SMA dan sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Informan kelima adalah Marzuki selaku Kepala Dusun Sekeladi Hulu, saat ini beliau berusia 60 tahun dengan pendidikan terakhir SMP dan sehari-harinya bekerja sebagai petani. Informan terakhir adalah Sulaiman selaku Ketua RW 1, saat ini beliau berusia 48 tahun dengan pendidikan terakhir SMA dan sehari-harinya bekerja sebagai petani.

Pelaksanaan Program Swakelola Bantuan Rumah Layak Huni di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Pelaksanaan bantuan rumah layak huni di Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014. Program ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap hunian yang layak, khususnya di daerah pesisir dan wilayah-wilayah tertinggal. Pemerintah Kabupaten mendorong pelibatan masyarakat secara aktif melalui pendekatan pemberdayaan, dengan menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan perubahan nyata dalam kualitas hidup masyarakat miskin melalui perbaikan infrastruktur dasar, termasuk tempat tinggal. Tahapan pelaksanaan program ini dimulai sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan:
 - Penetapan lokasi dan anggaran: Lokasi pelaksanaan program ditentukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
 - Penyusunan pedoman teknis: Pedoman ini berisi prinsip, pendekatan, mekanisme, dan indikator keberhasilan program.
 - Musyawarah kepenghuluan/ kelurahan: Dilaksanakan untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan secara partisipatif dan prioritas. Hasil musyawarah disampaikan ke kabupaten untuk verifikasi dan penetapan melalui Surat Keputusan.
 - Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya): Disusun oleh Pokmas dengan didampingi konsultan teknis, lalu divalidasi oleh PPTK.
 - Pembukaan rekening Pokmas: Setelah RAB disahkan, Pokmas membuka rekening bank untuk menerima pencairan dana bantuan.
 - Penandatanganan kontrak kerja: Dilakukan antara Pokmas dengan pengguna anggaran sebagai tanda resmi dimulainya kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan Fisik:

- Penyiapan lokasi: Pokmas memastikan lokasi pembangunan siap dikerjakan.
 - Pengadaan material dan pelaksanaan pembangunan: Seluruh proses pembangunan dilaksanakan sendiri oleh Pokmas dengan melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja. Pokmas tidak diperbolehkan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga.
3. Proses Pencairan Dana:
Dana dicairkan secara bertahap sebanyak tiga kali sesuai progres fisik yang telah dicapai:
- Tahap I (40% dana): Diberikan saat target fisik awal sebesar 40% dimulai, dengan melampirkan kontrak dan jaminan uang muka.
 - Tahap II (30% dana): Diberikan setelah 40% target fisik selesai. Diperlukan laporan progres, berita acara pemeriksaan lapangan, dan dokumentasi kegiatan.
 - Tahap III (30% dana): Diberikan setelah 70% pekerjaan selesai, dengan persyaratan serupa dan dilengkapi surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan.
4. Tahap Monitoring dan Pelaporan:
- Monitoring: Dilakukan berkala oleh PPTK, pengendali program, dan pengguna anggaran untuk memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan.
 - Pelaporan: Pokmas wajib membuat laporan penggunaan dana dan perkembangan fisik secara berkala (mingguan/bulanan).
5. Tahap Pasca Pelaksanaan:
- Penyusunan laporan akhir: Pokmas membuat laporan penyelesaian kegiatan.
 - Serah terima pekerjaan: Dilakukan dari Pokmas ke pengguna anggaran, lalu dari pengguna anggaran ke kepala daerah atau pihak yang diberi wewenang.
 - Pemeliharaan: Sarana prasarana yang telah dibangun dipelihara oleh penerima bantuan bersama unsur pemerintah desa dan lembaga masyarakat setempat.

Kelompok masyarakat (Pokmas) bertindak sebagai pelaksana utama program di lapangan. Pokmas bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan fisik dan penggunaan dana, serta tidak diperbolehkan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, Pokmas wajib melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja, guna mendorong kesempatan kerja dan partisipasi lokal. Pengawasan teknis dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dibantu oleh pengendali program dan konsultan yang ditunjuk.

Kriteria penerima bantuan ditetapkan secara musyawarah dan mengutamakan warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni atau sama sekali tidak memiliki rumah. Pelaksanaan program ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, program tidak hanya ditujukan untuk membangun fisik rumah, tetapi juga membangun kesadaran, tanggung jawab, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola kebutuhan dasarnya.

Program ini dirancang untuk mendorong masyarakat miskin agar lebih mandiri, berdaya, dan terlibat aktif dalam pembangunan permukiman di wilayahnya sendiri. Proses pelaksanaannya bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu. Setiap tahapan disusun agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kapasitas sosial dalam mengelola dan mempertahankan hasil pembangunan tersebut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang disusun merujuk pada teori Grindle (dalam Natsir, 2019:59) serta didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi diperoleh sebagai berikut:

Isi Kebijakan

Kesimpulan dari hasil wawancara atas sub indikator tipe manfaat dari program rumah layak huni di Kepenghuluan Sekeladi secara umum dirasakan nyata oleh penerima. Ketua Pokmas dan penghulu sepakat bahwa pelaksanaan telah sesuai pedoman dan penerima merupakan warga dengan kondisi rumah tidak layak dan penghasilan rendah. Program dinilai telah memberikan dampak positif secara fisik maupun sosial, terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pola swakelola. Namun demikian, keterbatasan kuota dan kurangnya sosialisasi menjadi celah dalam pelaksanaan program. Ketua RT 4 mengungkapkan adanya kecemburuan sosial karena sebagian warga merasa lebih layak namun tidak terakomodasi, sementara seorang warga miskin menyatakan tidak memahami prosedur pendaftaran. Hal ini memperlihatkan bahwa manfaat program belum sepenuhnya merata, dan masih diperlukan peningkatan transparansi serta akses informasi agar kebijakan ini benar-benar tepat sasaran.

Kesimpulan dari wawancara atas sub indikator derajat perubahan yang diharapkan dari program rumah layak huni sangat tinggi, tidak hanya sebatas pada aspek fisik bangunan, tetapi juga terhadap kualitas hidup, kesehatan, motivasi kerja, hingga kenyamanan keluarga. Ketua Pokmas dan penghulu menilai program ini mampu menjadi pemicu perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, selama pelaksanaannya tepat sasaran dan melibatkan masyarakat secara aktif. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah penerima membuat dampak perubahan belum dirasakan secara luas. Ketua RT 4 dan warga yang belum menerima bantuan menekankan bahwa manfaat program sejauh ini baru menjangkau sebagian kecil masyarakat. Oleh karena itu, agar derajat perubahan yang diharapkan benar-benar tercapai, dibutuhkan peningkatan kuota bantuan, pemerataan akses, serta perbaikan dalam sosialisasi program ke seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan dari wawancara atas sub indikator pelatihan program rumah layak huni di tingkat Kepenghuluan Sekeladi belum dilaksanakan secara optimal. Ketua Pokmas dan penghulu sama-sama mengakui bahwa bentuk pembekalan yang diterima selama ini masih sebatas arahan teknis atau pengarahan umum dari dinas terkait. Kondisi ini menyebabkan pelaksana harus mengandalkan pengalaman pribadi dan koordinasi internal dalam menjalankan kegiatan program. Ketiadaan pelatihan teknis khusus dinilai sebagai celah penting dalam pelaksanaan program berbasis swakelola seperti ini. Mengingat kompleksitas teknis dan keuangan yang melekat dalam pembangunan rumah, seharusnya pelatihan mencakup manajemen proyek, pengawasan kualitas bangunan, serta pelaporan anggaran. Tanpa pelatihan yang memadai, risiko kesalahan teknis atau ketidaksesuaian prosedur akan lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, pembangunan rumah sederhana layak huni memiliki standar spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan kondisi geografis lokasi, baik di kawasan tanah keras (daratan) maupun tanah rawa/pesisir. Struktur rumah mencakup pondasi yang

disesuaikan dengan kondisi lahan, seperti pondasi bertulang dengan plat kaki (foot plate) untuk tanah rawa, serta pondasi rollag bata untuk tanah keras. Struktur bangunan menggunakan beton bertulang campuran 1:2:3 dengan ukuran sloof 15/25 cm, kolom praktis 13/13 cm, ring balok 13/15 cm, balok latei 13/13 cm, dan plat lantai setebal 5–10 cm tergantung kondisi. Dinding rumah dibangun dengan batu bata, diplester dan diaci dengan komposisi adukan 1:4, serta diperhatikan nilai estetika bangunannya.

Bagian atap rumah menggunakan rangka kayu berkualitas dengan dimensi standar seperti balok tarik 3/10 cm, kaki kuda-kuda 5/8 cm, dan gording 5/8 cm. Penutup atap menggunakan seng BJLS berwarna dari pabrikan. Plafon dipasang menggunakan rangka kayu dengan jarak 120 x 120 cm dan penutup triplek tebal 3,8 mm. Pintu dan jendela dibuat dari kayu berkualitas, dengan pintu panel menggunakan engsel 4 inci dan jendela dilengkapi kaca bening 5 mm serta grendel dan hak angin. Untuk finishing, seluruh bagian rumah dicat dengan tiga kali sapuan agar hasil merata, sementara pintu, jendela, dan listplank diplamir terlebih dahulu sebelum dicat minyak. Spesifikasi ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat swakelola dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin, kualitas bangunan tetap memperhatikan aspek kekuatan, keamanan, dan kenyamanan penghuni.

Konteks Kebijakan

Kesimpulan dari hasil wawancara atas sub indikator kekuasaan dan strategi dalam pelaksanaan program rumah layak huni masih sangat terpusat pada struktur pemerintah desa atau kepenghuluan. Ketua Pokmas berperan pasif dan hanya menjalankan arahan teknis, sedangkan penghulu menekankan pengambilan keputusan secara kolektif dengan perangkat desa untuk menjaga legitimasi dan mencegah konflik. Strategi ini dianggap sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dalam distribusi bantuan. Namun, di tingkat masyarakat terdapat persepsi bahwa distribusi kekuasaan tidak sepenuhnya netral. Ketua RT menyampaikan adanya dugaan dari warga mengenai kecenderungan penerima berasal dari kalangan dekat pemerintah desa, sementara warga miskin seperti Asmi merasa tidak memiliki akses informasi dan kekuasaan. Ketimpangan dalam persepsi ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah lokal belum sepenuhnya menjembatani harapan masyarakat terhadap keadilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kesimpulan dari hasil wawancara atas sub indikator karakteristik lembaga dan penguasa pelaksana program rumah layak huni di Kepenghuluan Sekeladi didominasi oleh struktur berbasis komunitas dan birokrasi masyarakat berbasis swakelola. Pokmas terbentuk dari masyarakat secara partisipatif namun memiliki keterbatasan dari sisi teknis dan administratif. Sementara itu, kepenghuluan memiliki kekuasaan administratif dengan ruang gerak terbatas oleh kebijakan tingkat kabupaten, tetapi masih memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lokal. Namun, efektivitas kelembagaan masih menghadapi kendala dalam aspek koordinasi, komunikasi, dan jangkauan ke masyarakat. Ketua RT dan warga menyuarakan minimnya interaksi langsung antara lembaga pelaksana dan warga, yang menunjukkan belum optimalnya karakter kepemimpinan dan struktur kerja lembaga lokal. Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu adanya penguatan kelembagaan melalui pelatihan, sistem koordinasi antar level, serta pembukaan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi menunjukkan kaitan antara Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 dengan upaya Pemda Rohil memberikan bantuan 20 unit

Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun 2024 menunjukkan kesinambungan komitmen pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini menjadi landasan normatif dan operasional dalam pelaksanaan program RLH, di mana mekanisme pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan keterlibatan aktif warga setempat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Bantuan 20 unit RLH tahun 2024 menjadi bukti bahwa Pemda Rohil tidak hanya menjaga kesinambungan program, tetapi juga berupaya menjalankannya secara terstruktur sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Setiap tahapan seperti musyawarah kepenghuluan untuk penentuan penerima, penyusunan RAB, hingga proses pencairan dana tiga tahap tetap dijalankan sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan RLH 2024 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Swakelola Bantuan Rumah Layak Huni di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pokmas, Ketua RW 1 dan Kepala Dusun Sekeladi Hulu dapat disimpulkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni adalah lemahnya sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat umum. Ketua Pokmas menyampaikan bahwa meskipun pihaknya menjalankan tugas teknis dengan baik, peran dalam menyampaikan informasi program ke masyarakat belum maksimal. Pokmas lebih berfokus pada pelaksanaan fisik, dan menganggap bahwa proses musyawarah sudah cukup menjangkau masyarakat, meskipun kenyataannya belum semua warga memahami prosedur atau mekanisme program.

Penghulu mengakui bahwa informasi selama ini disampaikan melalui musyawarah dan tokoh masyarakat, namun pendekatan tersebut belum menjamin seluruh warga menerima dan memahami isi program. Sementara itu, Ketua RT menyatakan bahwa perangkat RT pun sering kali tidak mendapat informasi secara langsung dan lengkap, sehingga tidak mampu menjelaskan atau menanggapi pertanyaan warga secara memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak informasi antara pengelola program dan masyarakat penerima manfaat, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecemburuan sosial, hingga dugaan ketidakterbukaan dalam proses penentuan penerima bantuan. Secara keseluruhan, kurangnya transparansi dan sosialisasi ini berdampak langsung pada minimnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta berisiko melemahkan akuntabilitas program di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokmas, Penghulu, dan Ketua RT, dapat disimpulkan bahwa terbatasnya kuota bantuan rumah layak huni menjadi sumber utama munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kebijakan bahwa Kepenghuluan Sekeladi tidak mendapat alokasi bantuan pada tahun 2024 karena telah menerima pada tahun sebelumnya, memicu pertanyaan dan rasa ketidakpuasan dari warga yang belum pernah mendapat bantuan. Meskipun pelaksana dan pemerintah desa telah mencoba menjelaskan bahwa kuota ditentukan oleh pemerintah kabupaten dan bersifat bergilir, penjelasan tersebut belum cukup untuk meredakan rasa iri dan kecewa, terutama dari warga yang merasa kondisi rumah mereka lebih membutuhkan bantuan.

Kecemburuan sosial ini diperparah oleh minimnya kepastian dan kejelasan informasi terkait rotasi wilayah penerima di tahun-tahun berikutnya. Warga menganggap kebijakan

pembagian bantuan belum sepenuhnya adil dan transparan, karena tidak semua yang benar-benar membutuhkan mendapatkan kesempatan. Selain menimbulkan keresahan di lingkungan, situasi ini juga memberi tekanan tersendiri bagi aparatur lokal seperti Ketua RT dan Pokmas yang harus menjelaskan kebijakan yang berada di luar kewenangan mereka.

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas). Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat miskin dengan melibatkan warga secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Proses pelaksanaan dimulai dari musyawarah penetapan penerima, penyusunan RAB, pembukaan rekening Pokmas, hingga pembangunan fisik dan pencairan dana bertahap. Pelaksanaan di tingkat lokal juga menunjukkan peran aktif aparatur desa dan masyarakat dalam mengawal jalannya program, baik dari sisi teknis maupun administratif. Meskipun kuota yang diterima terbatas, pelaksanaan program berjalan sesuai tahapan dan pedoman yang berlaku, dan mampu menciptakan dampak positif terhadap kondisi tempat tinggal penerima bantuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Swakelola Bantuan Rumah Layak Huni di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari kurangnya transparansi dan sosialisasi program bantuan rumah layak huni ke masyarakat umum dan juga kuota penerima bantuan terbatas.

Daftar Pustaka

- Anisa, I. (2021). Implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin di kecamatan long kali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 48-69.
- Bawono, I.R., & Setyadi, E. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kompas Grasindo Persada.
- Beni, F. V. (2023). Analisis pelaksanaan program rumah layak huni dalam mengentaskan kemiskinan kecamatan bagan kabupaten rokan hilir. *Journal of Economics, Business and management issues*, 1(1), 1154-1170 .
- Bihanding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, L. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanif, N. (2007). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hoesein, U. (2014). Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karyoto. (2016). Manajemen (Teori, Definisi dan Konsep). Yogyakarta: Kencana.
- Kawer, O. F. S. (2018). Implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni dengan pendekatan hibrida di kabupaten supiori provinsi papua. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(3), Nopember 2018: 245 – 253
- Keputusan Penghulu Sekeladi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni Kepenghuluan Sekeladi di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
- Kunarjo. (2012). Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, M. (2013). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan. (2022). Politik Penentuan Sasaran Program Rumah Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan). *Jurnal KAWASA*, Vol XVIII, No 1, Januari 2018.
- Marwansyah. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Musanef. (2011). Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: CV Gunung Agung.
- Natsir, M. (2019). Negeri Dikepung Racun: Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Produk Makanan dan Minuman Terhadap Zat Pewarna Terlarang di Kabupaten Probolinggo. Jakarta: Indomedia Pustaka.
- Ndraha, T. (2013). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) edisi I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman dan Prasarana Desa dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
- Sholihin, A. (2005). Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sinambela, P. L. (2016) Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). Filsafat dan Kebijakan dalam Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, W. (2011). Perencanaan Desa. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatna, T. (2000). Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Syafiie, I. K. (2013). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Terry, G. R. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, M. (2013). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, H. (2012). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waldo, D. (2018). *Pengantar Studi Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2017). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Widiatmoko, A. (2022). *Kesejahteraan Sosial di Desa: suatu telaah kebijakan program pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Wursanto, I. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.

- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.

- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.

- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020*, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.

- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.

- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.

- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In

- International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.

- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".